



► PENERIMAAN NEGARA

Prabowo Disebut Setuju Kenaikan PPN 12%

JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto dikabarkan setuju untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 dari sebelumnya hanya 11%.

Harian Jogja
redaksi@harianjogja.com

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan kenaikan PPN menjadi 12% bakal diterapkan untuk beberapa golongan barang saja. Hal ini dia sampaikan sesuai mengikuti pertemuan bersama dengan perwakilan DPR Komisi 11 dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (5/12).

“Hasil diskusi kami dengan Presiden Prabowo, akan tetap mengikuti Undang-Undang PPN [12%] akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu, amanat di Undang-Undang yaitu 1 Januari 2025,” katanya kepada wartawan di Kantor Presiden, kemarin.

Misbakhun memerinci penerapan PPN akan selektif kepada beberapa golongan barang, baik itu dalam

► Penerapan PPN akan selektif kepada beberapa golongan barang.

► Akan ada kajian lebih mendalam agar penerapan PPN 12% tidak berlaku dalam satu tarif.

negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku, yakni 11%.

Dia melanjutkan hasil diskusi tersebut juga menunjukkan Presiden Prabowo akan melakukan kajian lebih mendalam agar penerapan PPN 12% tidak berlaku dalam satu tarif.

Misbakhun mencontohkan untuk kelompok barang seperti barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, dan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, dan jasa pemerintahan dikecualikan dari PPN.

Apalagi, dia menyebut saat ini Prabowo mengatakan tengah berusaha menertibkan banyak

urusan yang berkaitan dengan hal-hal ilegal, sehingga diharapkan dapat menambah penerimaan negara yang selama ini tidak terdeteksi.

“Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan, tetap tidak digunakan PPN,” ucap Misbakhun.

Ketua DPR, Puan Maharani, mengingatkan pemerintah berhak mengevaluasi kebijakan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Kendati sudah menjadi amanat UU HPP, Puan berharap pemerintah bisa mendengarkan dulu aspirasi seluruh masyarakat sebelum memutuskan hal yang sangat krusial itu. “Walaupun memang itu sudah ditentukan dalam undang-undang namun pemerintah juga berhak untuk kemudian mengevaluasi. Dilihat bagaimana aspirasi masyarakat dan bagaimana situasi ekonomi saat ini,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta. (JIBI/bisnis.com)